

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Akuntansi sektor publik adalah proses dalam pengumpulan, pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pembuatan laporan keuangan entitas publik. Akuntansi sektor publik digunakan untuk memenuhi hak-hak publik dalam hal transparansi dan aksesibilitas laporan keuangan agar publik dapat mengetahui bagaimana kinerja dari pemerintah selama ini.

Transparansi dan aksesibilitas dalam beberapa dekade terakhir mendapatkan perhatian dikarenakan adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai realisasi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam menentukan pengeluaran anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melakukan reformasi penyajian laporan keuangan, yaitu pemerintah harus mampu menyediakan seluruh informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006; Hehanussa 2015).

Dalam penyajian laporan keuangan yang transparan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan, pemerintah tidak bisa menutupi hal ini dari publik dikarenakan telah terjadi perubahan dalam

pengelolaan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, maka laporan keuangan pemerintah harus di publikasikan agar publik dapat mengetahui dan dapat menganalisa dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah. Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi-informasi politik dan ekonomi pemerintah sedangkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah secara jelas, mudah dipahami dan penyajian keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan walaupun dua bagian yang berbeda. Jika akuntabilitas keuangan pemerintah daerah tidak disertai dengan transparansi maka keuangan pemerintah daerah tersebut dianggap sebuah manipulasi dan kebohongan semata. Publik tidak mendapatkan informasi yang semestinya didapatkan. Namun pada saat sekarang ini transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih belum optimal (Hehanussa, 2015).

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu dengan mengharuskan

pemerintah untuk menyusun suatu laporan keuangan dengan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjamin serta diperlukannya suatu sistem akuntansi yang baik, dan sistem tersebut dijalankan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana (Indria, 2018). Dengan adanya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sangat memudahkan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan secara cermat dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkannya.

Semakin baik pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan secara terbuka dan jujur, maka semakin meningkatkan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Realisasi dari aksesibilitas yaitu kemudahan bagi publik dalam mengakses laporan keuangan maka akan terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, masih terdapat pemerintah daerah yang belum maksimal dalam mempublikasikan laporan keuangan daerah secara transparan melalui media sosial, media massa atau dengan cara lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok merupakan salah satu entitas pelaporan yang wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok selama 9 tahun terakhir ini mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pemerintah Kabupaten Solok mendapatkan opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak lima kali berturut-turut pada tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2016. Sedangkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok empat kali berturut-turut pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020 lalu. Walaupun pemerintah Kabupaten Solok mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak empat kali berturut-turut, namun BPK masih menemukan kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap Undang Undang yang berlaku dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Solok tahun anggaran 2020 yang perlu ditindak lanjuti. Hal ini menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Solok untuk memperbaikinya.

Dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini, pemerintah Kabupaten Solok harus selalu meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya agar hal ini dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya. Namun, berhubungan dengan transparansi, masyarakat pemerintah Kabupaten Solok masih belum mudah mendapatkan akses laporan keuangan daerah melalui portal pelayanan informasi publik atau PPID Kabupaten Solok melalui alamat <http://ppid.solokkab.go.id/> tidak ditemukan LKPD pada menu laporan keuangan saat melakukan pencarian. Dilaman PPID Kabupaten Solok tersebut setiap pengakses harus login terlebih dahulu agar dapat mengakses informasi yang telah disediakan. Namun, pengakses yang telah memiliki akun juga tidak dapat mengakses LKPD Kabupaten Solok. Dilihat dari fenomena yang tersebut, pemerintah Kabupaten Solok belum maksimal menyediakan wadah publikasi LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan memberikan seluruh informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka

kepada masyarakat atau publik melalui media sosial (*website*) sehingga publik mengetahui dan dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan pemerintah Kabupaten Solok.

Penelitian tentang hubungan antara penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sudah banyak dilakukan, diantaranya; Guasmin (2019), Varida (2018), Fauziyah (2017), Masyhur (2017), Kurniawati (2016), Hehanussa (2015), Sande (2013), Aliyah (2012) dan Mustofa (2012) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun penelitian Indria (2018) menemukan hasil yang berbeda yaitu aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tetapi secara simultan penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang sama di daerah Kabupaten Solok dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Solok?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Solok?
3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Solok?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Solok.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Solok.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi penulis

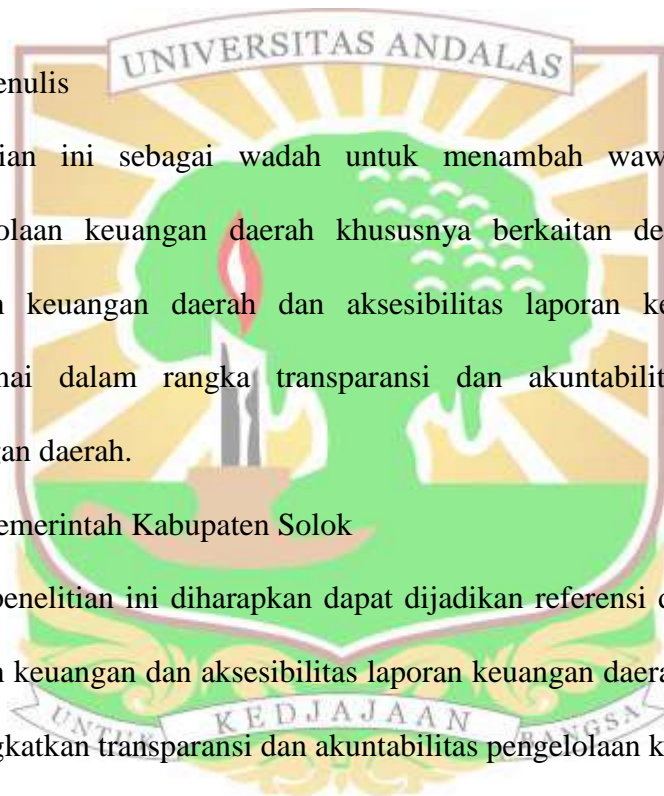
Penelitian ini sebagai wadah untuk menambah wawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah khususnya berkaitan dengan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah mengenai dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Solok

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun secara sistematis terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN REFERENSI

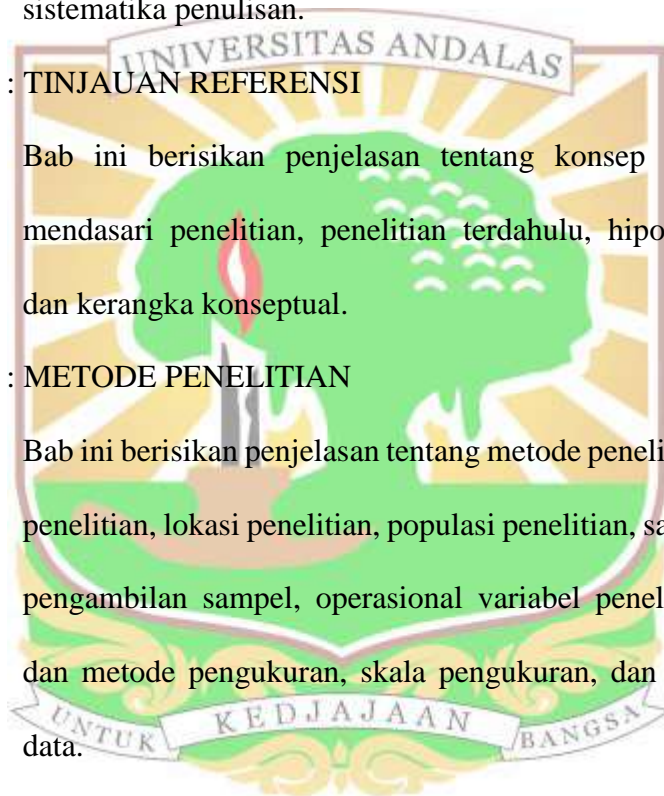
Bab ini berisikan penjelasan tentang konsep dan teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka konseptual.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang metode penelitian yaitu desain penelitian, lokasi penelitian, populasi penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel, operasional variabel penelitian, jenis data dan metode pengukuran, skala pengukuran, dan metode analisis data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan.





## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan penjelasan tentang kesimpulan dari hasil analisis data serta pembahasannya, keterbatasan penelitian, serta saran yang diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya.

